

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2023
KECAMATAN WOTU**



**Kecamatan Wotu
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja kecamatan Wotu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan Wotu sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota, provinsi dan nasional

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka diterbitkan peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju tata kelola pemerintahan yang baik maka Kecamatan Wotu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Kecamatan Wotu merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Bauru dan Kecamatan Wotu terdiri dari 17 (Tujuh Belas Desa) yaitu Desa Lampenai, Desa Bawalipu, Desa Lera, Desa Balo-Balo, Desa Cendana Hijau, Desa pepuro Barat, Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, Desa Maramba, Desa Madani, Desa kanawatu, Desa Karambua, Desa Rinjani, Desa Kalaena, Desa Bahari, Desa Tabaroge dan Desa Arolipu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wotu yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- e. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Wotu memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis eksternal dan aspek strategis internal.

1. Aspek Strategis Eksternal

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Wotu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Wotu pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu.

2. Aspek Strategis Internal

Selain aspek strategis eksternal, Kecamatan Wotu juga memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Wotu per 31 Desember 2023 berjumlah 35 orang terdiri dari 19 orang PNS dan 14 orang tenaga upah jasa dan suka rela 2 orang. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

a. Data Kepegawaian Knator Kecamatan Wotu Per 31 Desember 2023

- 1) Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 31 Desember 2023

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	19
2.	Upah Jasa	14
3.	Suka Rela	2
Total		35

2) Komposisi PNS Menurut Jabatan Per 31 Desember 2023

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I.	Struktural	7
1.	Eselon III-A (Camat)	1
2.	Eselon III-B (Sekretaris Camat)	1
3.	Eselon IV-A (Kepala Seksi)	4
	- Kasi. Pemerintahan Umum	1
	- Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa	1
	- Kasi. Trantib Umum	1
	- Kasi. Pelayanan Umum	1
4.	Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian)	2
	- Kasubag. Umum & Keuangan	1
	- Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian	1
II.	Fungsional Tertentu	-
III.	Fungsional Umum	-
Total		8

3) Komposisi PNS Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	1	-	-	2
2.	Golongan III	6	2	2	1	11
3.	Golongan II	-	-	1	5	6
4.	Golongan I					-
Total						19

4) Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S.2	1
2.	S.1/D.IV	9
2.	D.II / D.III	-
3.	SLTA Sederajat	9
4.	SLTP Sederajat	-
5.	SD	-
Total		19

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	35.934	m ²	
2.	Bangunan	3	Unit	Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Gedung Pertemuan
3.	Peralatan dan Mesin	35	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll.
4.	Jaringan Internet	2	Unit	Wifi
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Toyota Rush
6.	Motor Dinas	6	Unit	Type : 3 Shogun SP,1 Vega R,1 Supra Pit,1Shogun R

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan aula sedangkan sarana parkir kendaraan belum ada.

c. Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3.086.769.775,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Belanja pegawai	2.054.201.269,00
2.	Belanja Barang jasa	1.032.568.506,00
3.	Belanja Modal	0
	Total	3.086.769.775,00

C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Wotu melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan Umum

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
- c. memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
- d. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- e. melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-keperintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

- a. melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;

- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- d. melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

4. Seksi Pelayanan Umum

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh seksi ini kepada masyarakat, antara lain : menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :

- ✚ Akta jual beli
- ✚ Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
- ✚ Surat keterangan tidak mampu
- ✚ Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
- ✚ menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
- ✚ memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- ✚ melakukan pelayanan administrasi perizinan;
- ✚ melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.

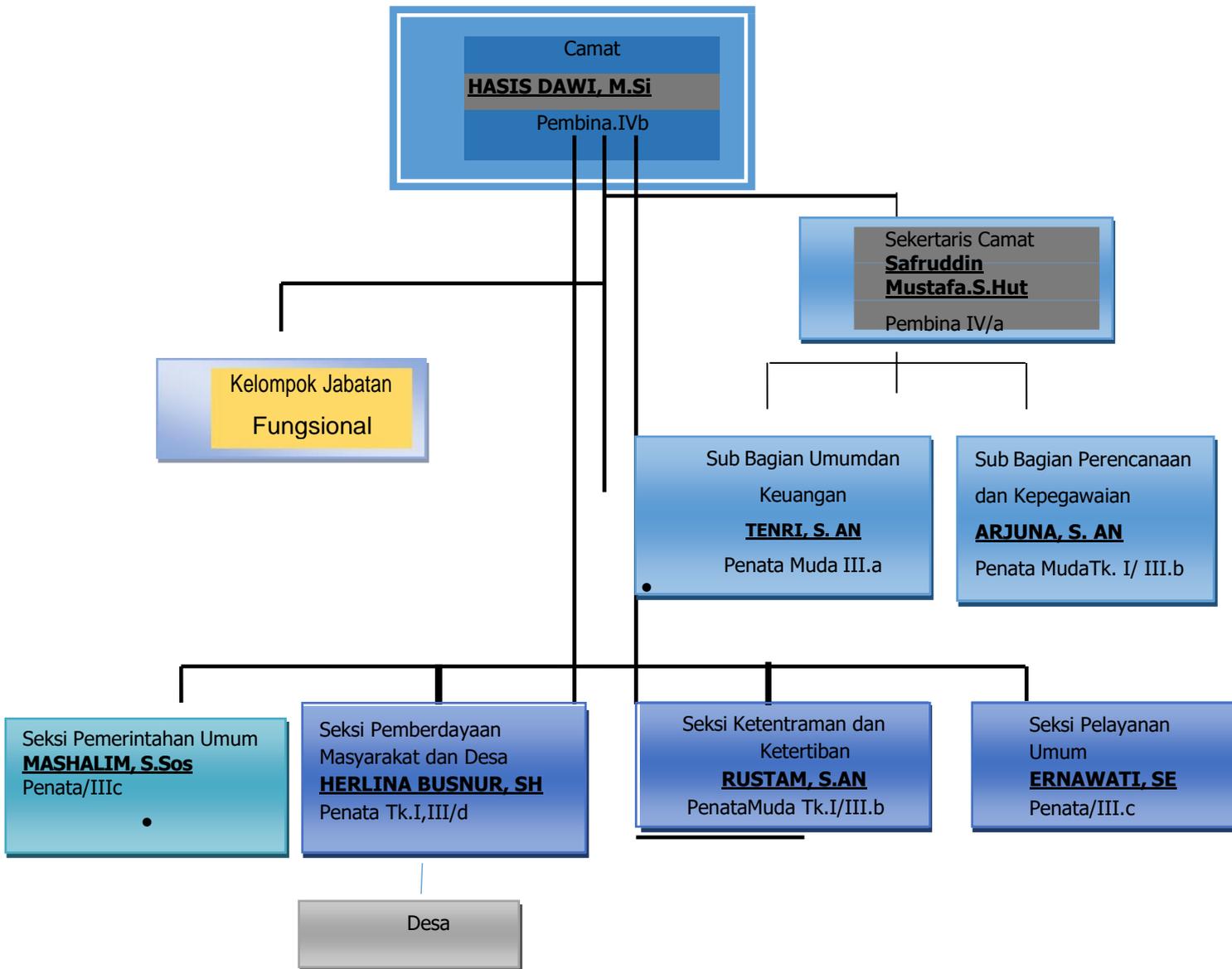
D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Wotu mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Wotu sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Wotu adalah sebagaimana di tampilan di bawah ini :



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wotu Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Kecamatan Wotu dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Wotu mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA

Visi ini bermakna bahwa Kecamatan Wotu dengan segala potensi yang ada akan berpartisipasi menjadikan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 merupakan kabupaten terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi, Kecamatan Wotu menetapkan misi yang juga mengacu pada misi Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang
yang Lebih Baik**

Sasaran umum yang akan dicapai dari misi ini adalah meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya kinerja pelayanan publik.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implemementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Kecamatan Wotu tercermin dalam tujuan strategis sebagai berikut :

Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kecamatan Wotu yang diharapkan dicapai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- ✦ Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan;
- ✦ Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

5. Sasaran Program

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Wotu menjalankan 6 program dengan 14 kegiatan. Sasaran-sasaran yang akan dicapai dari program program tersebut antara lain :

- a. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Wotu ;
- b. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Wotu;
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Wotu;
- d. Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Kecamatan Wotu yang tepat waktu;
- e. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan Wotu yang tepat waktu;
- f. Meningkatnya pelayanan kecamatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wotu;
- g. Meningkatnya pelayanan kecamatan dalam mendukung pemerintahan di Kecamatan Wotu;
- h. Meningkatnya pelayanan kecamatan dalam mendukung ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Wotu; dan
- i. Meningkatnya pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum di Kecamatan Wotu.

6. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana dua sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

**Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Wotu
dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wotu**

maka harus ditetapkan pula indikator kinerja utama untuk mengukur capaian dari dua sasaran tersebut. Adapun indikator yang telah ditetapkan terhadap masing masing sasaran strategis tersebut adalah :

No.	Uraian Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Wotu	Nilai LAKIP	77

Selain indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis, ditetapkan pula indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang digunakan mengukur capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

a. Indikator Kinerja Program

Program Kecamatan Wotu merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wotu yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi serta berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pelayanan dengan indikator kinerja yang terukur. Sasaran program yang termuat dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 program dengan indikator kinerja program masing masing sebagai berikut :

No.	Uraian Sasaran Program	Uraian Indikator Program	Target 2023
1	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik(%)	100%

2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wotu	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wotu	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketenraman dan Ketertiban Umum (%)	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Wotu	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100%
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa di Kecamatan Wotu	Persentase capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100%
6	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota di Kecamatan Wotu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

Enam program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja di atas adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
3. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum 2 (Dua) Kegiatan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan;

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran program pelayanan Kecamatan Wotu diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023
1	Terpenuhinya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	Dok	2

2	Terpenuhinya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD Kecamatan yang disusun tepat waktu	Dok	2
3	Terpenuhinya Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD Kecamatan yang disusun tepat Waktu	Dok	2
4	Terpenuhinya Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	10
5	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	Org	20
6	Terpenuhinya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun tepat waktu	Dok	12
7	Terpenuhinya Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	4
8	Terpenuhinya Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	Dok	12
9	Tersedianya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Lprn	12
10	Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Org	2
11	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	9
12	Terbayarnya Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	6
13	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	3
14	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Exmp	60
15	Terlaksanya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Org	1.500
16	Terlaksanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diselenggarakan	kali	743

17	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Unit	0
18	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	Jenis	0
19	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	surat	1.500
20	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang Terbayarkan	Rek	60
21	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	2
22	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	org	16
23	Terpeliharanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7
24	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	unit	8
25	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	2
26	Terlaksananya pelayanan adm. perizinan	Jumlah administrasi Perizinan yang 110 lembar Dikeluarkan	lembar	140
27	Terlaksananya Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	persen	0,38
28	Terlaksananya PKK Desa yang diberdayakan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	org	90
29	Terlaksananya Sinergitasa dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Inastansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	persen	100
30	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat dalam Upaya Hibauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	Kali	12

31	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Presentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang berhasil diselesaikan	Kali	4
32	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Rapat forumkoordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	Kali	12
33	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Difasilitasi Penyusunannya	Dok	34
34	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Pedesaan yang terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya	Desa	17

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sasaran tersebut di atas sebanyak 34 kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja perangkat daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD;
7. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
8. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah;
9. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
10. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan;
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
16. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
26. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
27. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
28. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
29. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

30. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
31. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
32. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
33. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
34. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wotu	Nilai LAKIP	77

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pemerintah Kecamatan Wotu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan tersebut memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Adapun sasaran 1 (satu) Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 Dapat dilihat pada table dibawah ini :

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan Wotu

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	78,25	95,43 %

❖ **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama Sebagai Berikut :**

Berdasarkan pada tabel diatas target pada Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercantum pada eplanning sebesar 82 dengan perolehan realisasi sebesar 78,25 , maka persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 95,43, ini menggambarkan bahwa hasil yang diperoleh sudah membaik. Hasil indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2023 Kecamatan Wotu berdasarkan 13 pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman indeks kepuasan masyarakat. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 125 atau melampaui target dengan nilai indeks 250 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- a.** Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur penjelasan informasi pelayanan nilai **3,26**
 - Faktor penghambat kenapa kecamatan Wotu pada unsur tanggungjawab pegawai dala memberikan pelayanan mendapat nilai rendah, disebabkan karena masih ada beberapa pegawai kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
- b.** Solusi untuk permasalahan kurangnya tanggungjawab pegawai dalam memberikan pelayanan adalah perlu adanya motivasi diri untuk meningkatkan kinerja.Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur pelayanan cepat nilai **3,39**
 - Faktor pendukung kenapa kecamatan Wotu pada unsur pelayanan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan dan kelompok kenyamanan lingkungan

kantor mendapat nilai tinggi, disebabkan kesigapan petugas yang sopan dan ramah dalam melayani masyarakat.

➤ Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur pelayanan kemampuan aparat dan unsur kenyamanan lingkungan kantor adalah memberi bimbingan, supervisi, motivasi dan semangat kepada petugas pelayanan. Namun dalam pencapaian itu masih ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Sarana dan prasarana masih terbatas
- Staf yang menangani pelayanan masih kurang
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan

➤ **Solusi**

- Menyiapkan sarana dan prasarana
- Menambah staf untuk penanganan pelayanan
- Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perbandingan Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2021	2021	2023	2023	2023
		80	81.11	82	78.25	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja pada tahun 2022 Kecamatan Wotu sudah melakukan survei kepuasan masyarakat namun target renstra 80 dengan realisasi 81,11 artinya survei kepuasan masyarakat sudah baik. namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi, sedangkan pada tahun 2023 dengan target 82 terealisasi 78,25

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka Menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target renstra 2022	Persentase Capaian 2021-2026
1.	Meningkatnya kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan di Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat	2021	2022	2023	2023	
			85	81,11	78,25	81	...

Dengan melihat pada table diatas rata-rata capaian sampai dengan tahun 2023 mencapai 78 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2022 sebesar 80, maka target sampai dengan tahun 2023 peluangnya masih memungkinkan untuk dapat diwujudkan. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Wotu untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu dapat tercapai

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan Wotu dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di Kecamatan dan desa sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilana ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

- 1. Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan :**

- Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan
- Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
- Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang
- Belum adanya penguatan SDM di Kecamatan terkait APBDes
- Adanya kegiatan PKK yang dilaksanakan di luar daerah sehingga anggaran perjalanan dinas dalam daerah ada yang tidak terpakai.

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Memberi porsi bagi perempuan dalam menyampaikan usulan
- Melakukan bimtek/pelatihan terkait APBDes khususnya Tim Evaluasi kecamatan
- Sedapat mungkin kegiatan dilakukan di dalam daerah tersebut yaitu :
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan program/kegiatan
- Ditetapkannya APBDes Pokok dan Perubahan oleh masing-masing desa di Kecamatan Wotu
- Meningkatnya pembinaan terhadap TP.PKK Desa.

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan dengan Kegiatan :

- Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa dan unit kerja lingkup Kecamatan Wotu belum maksimal.
- Sebagian perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- Meningkatkan koordinasi antara FORKOPIMKA, pemerintah desa dan unit kerja melalui rapat koordinasi setiap bulan berjalan
- Memberikan pembinaan kepada perangkat desa terkait tupoksinya masing-masing
Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :
- Terserapnya anggaran yang disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
- Meningkatnya pemahaman perangkat desa terkait tupoksinya

2. Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban dengan kegiatan :

- Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
- Hambatan/Kendala
Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :
- Terkait dengan sengketa tanah antara penggugat dan tergugat selalu mempertahankan kebenarannya masing-masing ingin menang sendiri.
- Terkadang antara penggugat dan tergugat tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti sehingga diadakan pemanggilan dan pertemuan ulang.
- Solusi
Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :
- Penegakan aturan dan menyampaikan saran-saran dan pendapat antara kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
- Melakukan komunikasi secara intensip dan persuasip antara pihak penggugat dan tergugat.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu:
- Komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang bermasalah

3. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum

- Pelayanan Administrasi Perizinan
- Hambatan/Kendala
Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perizinan dan non perizinan

- Solusi
 - Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :
 - Memaksimalkan sosialisasi terkait aturan perizinan dan non perizinan
 Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :
 - Tercapainya targer PAD

Sasaran 2. Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2023 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Nilai LAKIP	77		

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Namun dapat digambarkan bahwa Nilai LAKIP Kantor Kecamatan Wotu pada **Tahun 2022 mendapatkan Nilai B (64,05)**. dan ini berarti bahwa hasil yang dicapai Belum maksimal. Pencapaian nilai LAKIP kantor kecamatan wotu belum maksimal dipengaruhi oleh beberapa dokumen yang tidak sama antar target dan realisasi pada dokumen yang lainnya. Dengan adanya hal tersebut maka kedepan dalam penyusunan target dan realisasi perlu ditingkatkan lagi sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2021	Target 2023	Realisasi 2023
	Nilai LAKIP	77	64,05	77	

Berdasarkan table di atas pada tahun 2022 nilai LAKIP yang diperoleh 64,05 artinya mengalami penurunan yang signifikan, namun pada tahun 2023 perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang direncanakan, dengan melihat nilai yang sangat menurun maka perlu dilengkapi beberapa dokumen pendukung dan paling utama yaitu tidak selaras antara indikator yang ada di Renstra dan beberapa dokumen lainnya, dan pada tahun 2023 belum dapat digambarkan realisasinya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target renstra	PersentasCapaian 2021-2026
			2021	2022	2023	Target	
1.	Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Nilai LAKIP	59,44	64,05		77	

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu LAKIP 64,05 (Predikat B) jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2023, yaitu LAKIP dengan jumlah skor sebanyak 77 maka target sampai dengan tahun 2023 perlu ditingkatkan dengan melihat sisi mana kekurangan pada tahun sebelumnya sehingga nantinya pencapaian di tahun akan datang dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Analisis keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Telah dilakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD Tahun 2021-2026
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wotu telah direvisi sesuai renstra tahun 2021-2026
- Evaluasi kinerja eselon sudah ada

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki kantor kecamatan Wotu dalam mencapai sasaran yang kedua, pemerintah kecamatan mampu mengefisienkan sumber daya dalam berbagai program/kegiatan. Efisiensi sumber daya yang sebagian kecil yang tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (Dua) yaitu **Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan** adalah :

1. Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Penyediaan listrik kantor masih tersisa disebabkan gedung kantor dalam tahap pembangunan sehingga pemakaian alat elektronik listrik tidak maksimal.
- Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

 - Melakukan inventarisasi kebutuhan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
 - Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

 - Pada umumnya kegiatan yang ada pada program administrasi perkantoran berjalan dengan baik

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.086.769.775,- Realisasi pengeluaran belanja APBD 2023 adalah sebesar Rp. 3.025.915.966,- (98%) Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini :

Realisasi anggaran Kecamatan Wotu tahun 2023 sebesar Rp. 3.025.915.966,- atau terserap 98 %. Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran per 31 Desember 2023

Rincian realisasi keuangan per program selengkapnya ditampilkan pada Tabel 13 dibawah ini

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Wotu

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
A.	BELANJA OPERASI	3.086.769.775,-	3.025.915.966,-	98%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.866.763.751,-	2.814.680.106,-	98%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.657.500,-	9.544.000,-	98%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	144.690.524,-	138.508.360,-	95%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.585.000,-	14.780.000,-	89%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.200.000,-	32.931.500,-	99%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.873.000,-	15.472.000,-	97%
TOTAL		3.086.769.775,-	3.025.915.966,-	98%

Rincian realisasi keuangan belanja sub kegiatan selengkapnya ditampilkan pada

Lampiran 2.

**Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan
Wotu**

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.866.763.751,-	2.814.680.106,-	98%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.252.000	66.168.000	97,95%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.290.000	23.210.000	99,66%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.260.000	6.110.000	97,60%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.965.000	6.725.000	96,55%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.737.000	30.123.080	98%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.035.481.269	1.992.612.507	97,89%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.006.921.269	1.992.612.507	99,29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.560.000	28.520.000	99,86
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12.780.000	12.610.000	98,67%
	Pelaporan Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Retribusi Daerah	12.780.000	12.610.000	98,67%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13.035.000	12.970.000	99,50%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.035.000	12.970.000	99,50%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.047.000	36.600.000	98,79%

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.337.000	3.090.000	92,60%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.710.000	33.510.000	99,41%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.067.700	408.405.000	99,85%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.134.700	2.116.000	99,12%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.675.000	9.645.000	99,69%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.350.000	13.175.000	98,69%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	5.800.000	96,67%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	186.430.000	186.420.000	99,99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.480.000	191.294.000	99,90%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.053.782	232.294.519	97,17%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.279.900	13.243.900	99,73%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.748.882	32.025.619	84,84%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.025.000	5.025.000	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.000.000	182.000.000	99,45%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	53.045.000	52.975.000	99,87%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.395.000	18.395.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.650.000	14.580.000	99,52%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	100%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.657.500	9.544.000	98,82%
1	<i>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	9.657.500	9.544.000	98,82%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	9.657.500	9.544.000	98,82%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	144.690.524	138.508.360	95,73%
1	<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	144.690.524	138.508.360	95,73%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.023.884	14.280.000	95,05%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	129.666.640	124.228.360	95,81%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.585.000	14.780.000	89,12%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.190.000	9.300.000	91,27%
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.145.000	6.015.000	81,91%

	- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.045.000	3.285.000	81,21%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.395.000	5.480.000	85,69%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.395.000	5.480.000	85,69%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.200.000	32.931.500	99,19%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.200.000	32.931.500	99,19%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.200.000	32.931.500	99,19%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.873.000	15.472.000	97,47%
1	<i>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	15.873.000	15.472.000	97,47%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.343.000	7.082.000	96,45%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	8.530.000	8.390.000	98,36%
TOTAL		3.086.769.775,-	3.025.915.966,-	98%

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (IKK) di atas diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Sub Kegiatan 1** **Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah**

Sasaran kegiatan "Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah" didukung satu indikator kinerja kegiatan (IKK) "Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 2 Dokumen atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 dokumen yang disusun tepat waktu.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 23.210.000,- atau 99,66% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 23.290.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan 2 **Tersusunnya dokumen RKA-SKPD tepat waktu**

Sasaran sub kegiatan " Tersusunnya dokumen RKA-SKPD tepat waktu" di dukung oleh IKK "Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 2 doumen atau mencapai 100% dari target 2 dokumen

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.6.110.000,- atau 97,60 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 6.620.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100% atau sama bila dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2023 sebesar 97,60%.

Sasaran Sub Kegiatan 3 **Tersusunnya dokumen DPA-SKPD tepat waktu**

Sasaran sub kegiatan " Tersusunnya dokumen DPA-SKPD tepat waktu" di dukung oleh IKK "Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 2 dokumen atau mencapai 100% dari target 2dokumen

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.6.725.000,- atau 96,55% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 6.965.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100% atau sama bila dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2023 sebesar 96,55%.

Sasaran Sub Kegiatan
4

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah tepat waktu

Sasaran sub kegiatan " Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu" di dukung oleh IKK "Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 10 dokumen atau mencapai 100% dari target 10 dokumen

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.30.123.080,- atau 98 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 30.737.000,-.

Dari sisi penggunaan dana IKK "Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu" telah tercapai secara efisien atau mencapai 100%.

Sasaran Sub Kegiatan
5

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan " Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN" di dukung oleh IKK "Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 19 orang atau mencapai 95 % dari target 20 orang.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 1.992.612.507,-atau 99,29 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.006.921.269,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya" belum efisien atau tidak mencapai 100% sebabkan karena adanya beberapa jabatan yang kosong pada kantor kecamatan wotu dikarenakan adanya pegawai yang pensiun ditriwulan pertama , sehingga anggaran terealisasi berdasarkan jumlah pegawai yang ada.

**Sasaran Sub Kegiatan
6**

Tersusunnya laporan keuangan

Sasaran sub kegiatan “ Tersusunnya laporan keuangan bulanan / Triwulan / semeseran SKPD” di dukung oleh IKK “Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu”.

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 12 dokumen atau mencapai 100 % dari target 12 dokumen.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 28.520.000,- atau 99,29% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 28.560.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu” sudah tercapai secara efisien sesuai target 100%

**Sasaran Sub Kegiatan
7**

Tersusunnya laporan penatausahaan milik daerah

Sasaran sub kegiatan “ Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu” di dukung oleh IKK “Jumlah Laporan penatausahaan yang disusun tepat waktu”.

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 4 dokumen atau mencapai 100 % dari target 4 dokumen.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 12.610.000,- atau 98,67 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 12.780.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah laporan penatausahaan milik daerah yang disusun tepat waktu” telah tercapai secara efisien sesuai target 100%.

**Sasaran SubKegiatan
8**

Tersusunnya laporan pengelolaan retribusi daerah

Sasaran sub kegiatan " Tersusunnya laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu" di dukung oleh IKK "Jumlah Laporan pengelolaan retribusi yang disusun tepat waktu".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 12 dokumen atau mencapai 100 % dari target 12 dokumen.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 12.970.000,- atau 99,50 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 13.035.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100% atau sama bila dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2023 sebesar 99,50%.

**Kegiatan Sasaran
9**

Terpenuhinya administrasi pegawai yang dimutakhirkan

Sasaran sub kegiatan " Tersediaanya data administrasi pegawai yang dimutakhirkan" di dukung oleh IKK "Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan"

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 12 dokumen atau mencapai 100% % dari target 12 Dokumen.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 3.090.000,- atau 92,60 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 3.337.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100% atau sama bila dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2023 sebesar 92,60%.

**Kegiatan Sasaran
10**

Terlaksananya kegiatan bintek implementasi Peraturan perundang undangan

Sasaran kegiatan "Terlaksananya kegiatan bintek implementasi peraturan perundang-undangan" didukung satu IKK yaitu "Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 2 orang atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 orang yang mengikuti bintek/diklat peraturan perundang- undangan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 33.510.000 atau 99,41% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 33.710.000,-. Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan" Sudah berjalan sesuai yang telah direncanakan 2023 sebesar 99,41%.

**Sasaran Sub Kegiatan
11**

**Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik
Penerangan bangunan**

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor" didukung satu IKK yaitu "Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 9 jenis atau mencapai 100% dari target sebanyak 9 jenis komponen listrik yang disediakan.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu penyediaan lampu bohlamp, saklar, kabel, sadel kabel, terminal stop kontak, fitting, baterai besar, baterai kecil dan baterai kotak. Komponen listrik ini digunakan pada kantor camat, gedung serbaguna maupun di rumah jabatan camat.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.2.116.000,- atau 99,12% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.134.700,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

**Kegiatan sub Sasaran
12**

Terpenuhinya kebutuhan Bahan logistic kantor

Sasaran kegiatan "Tersedianya bahan logistic kantor" didukung satu IKK yaitu "Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 6 jenis atau mencapai 100% dari target sebanyak 6 jenis bahan logistic yang disediakan.

Penyediaan bahan logistic kantor selama tahun 2023 meliputi:

1. BBM mesin potong rumput
2. Cairan pembersih lantai
3. Handzanitezer

4. Masker
5. Racun rumput
6. dll

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 9.645.000,- atau 99,69% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 9.675.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah bahan logistik yang disediakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan 13

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan" didukung satu IKK "Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 3 jenis atau mencapai 100% dari target sebanyak 3 jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan, yaitu berupa belanja cetak blangko SPPD, kuitansi, kartu kendali surat, spanduk kegiatan, baliho serta papan tupoksi;

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 13.175.000,- atau 98,69% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 13.350.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan 14

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan

Sasaran kegiatan "Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan" didukung satu IKK yaitu "Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 60 eksemplar atau mencapai 100% dari target sebanyak 60 eksemplar bahan bacaan yang disediakan.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama tahun 2023, meliputi:

1. Belanja koran regional (koran Palopo Pos dan Fajar);

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 5.800.000,- atau 96,67% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 6.000.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

**Sasaran Sub Kegiatan
15**

Terfasilitasinya kunjungan tamu

Sasaran kegiatan "Terfasilitasinya kunjungan tamu" didukung satu IKK yaitu "Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 1.500 kotak atau mencapai 100% dari target sebanyak 1.500 kotak makanan dan minuman tamu yang disediakan.

Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu selama tahun 2023, meliputi penyediaan makanan tamu dalam bentuk prasmanan dan kotak serta snack kotak.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 186.420.000,- Rp.186.430.000,- atau 99,99%.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Fasilitasi kunjungan tamu" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 99,99%.

**Sasaran Sub Kegiatan
16**

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD

Sasaran kegiatan "Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD" didukung satu IKK yaitu "Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 743 kali atau mencapai 100% dari target sebanyak 743 kali rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 191.294.160,- atau 99,90 % dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.191.480.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan

17

Terpenuhinya pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran kegiatan " Terpenuhinya pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan" didukung satu IKK yaitu "Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 0 unit telah mencapai mencapai 0% dari target sebanyak 0 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 0,-

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan" adalah 0% karena tidak adanya belanja modal pada tahun 2023.

Sasaran Sub Kegiatan

18

Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Sasaran kegiatan " Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya" didukung satu IKK yaitu "Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 0 Jenis mencapai mencapai 0% dari target sebanyak 0 Jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 0,-

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan" adalah 0% Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak adanya belanja modal pada tahun 2023

Sasaran Sub Kegiatan
19

Terpenuhinya jasa surat menyurat

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya jasa surat menyurat" didukung satu IKK "Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 1.500 surat atau mencapai 100% dari target sebanyak 1.500 surat yang diadministrasikan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 13.243.900,- atau 99,73% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 13.279.900,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan
20

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air
Dan listrik

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik" didukung satu IKK "Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 60 rekening atau mencapai 100% dari target sebanyak 60 rekening bulanan jasa internet, air bersih dan listrik .

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yaitu:

1. Pembayaran jasa sambungan internet kantor;
2. Pembayaran jasa penggunaan air PDAM untuk keperluan kantor camat, gedung serbaguna dan rumah jabatan;
3. Pembayaran jasa sumber daya listrik untuk penggunaan di kantor camat, gedung serbaguna dan rumah jabatan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 32.025.619,- atau 84,84% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 37.748.882,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik" tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%. Salah satu kendala yang mengakibatkan capaian kegiatan ini belum maksimal karena instalasi listrik gedung serbaguna menggunakan sistem prabayar, sehingga dari target 12 rekening token dalam 1 tahun (target 1 kali pengisian dalam 1 bulan) hanya terealisasi 12 rekening/pengisian, karena tidak setiap pengisian token listrik habis dalam waktu 1 bulan.

Sasaran Sub Kegiatan
21

Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor" didukung satu IKK "Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 3 jenis atau mencapai 100% dari target sebanyak 3 jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 5.025.000,- atau 100% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 5.025.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan" sudah terlaksana dan tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100 %. kegiatan terealisasi berdasarkan Kebutuhan Pada Kantor Kecamatan Wotu.

Sasaran Sub Kegiatan
22

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor

sasaran kegiatan "Tersedianya jasa pelayanan umum kantor" didukung satu IKK "Penyediaan jasa pelayanan umum kantor".

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 14 orang atau mencapai 87,5% dari target sebanyak 16 orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan.

Realisasi indicator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.182.000.000,- Dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 183.000.000,-

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan" belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 87,5%.

Sasaran Sub Kegiatan
23

Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sasaran kegiatan "Terpeliharanya kendaraan operasional" didukung satu IKK yaitu "Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 7 unit atau mencapai 100% dari target sebanyak 7 unit pemeliharaan kendaraan dinas.

Kegiatan pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional tahun 2023, yaitu :

1. Service;
2. Penggantian suku cadang;
3. Penggantian pelumas; dan
4. pembayaran pajak/STNK

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp 18.395.990,- atau 100% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 18.395.990,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara" telah tercapai secara efisien.

Sasaran Sub Kegiatan

24

Terpeliharanya peralatan dan mesin

Sasaran kegiatan "Terpeliharanya peralatan dan mesin" didukung satu IKK yaitu "Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 8 unit atau mencapai 100% dari target sebanyak 10 unit pemeliharaan peralatan dan mesin.

Kegiatan pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional tahun 2023, yaitu :

1. Pemeliharaan mesin babat;
2. Pemeliharaan AC;
3. Pemeliharaan computer
4. Pemeliharaan Laptop; dan
5. Pemeliharaan Printer.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 14.580.000,- atau 94,52% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 14.650.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara" telah tercapai secara efisien. Karena Sub kegiatan yang terealisasi sudah berdasarkan Kebutuhan barang pada kantor Kecamatan Wotu yang membutuhkan Pemeliharaan.

Sasaran Sub Kegiatan

25

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya

Sasaran kegiatan "Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya" didukung satu IKK yaitu "Jumlah bangunan yang termanfaatkan".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 2 unit atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 unit gedung kantor yang dipelihara.

Kegiatan pemeliharaan rumah jabatan tahun 2023 yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengecetan taman rumah jabatan;
2. Pengecetan Pagar Kantor Camat Wotu

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah bangunan yang termanfaatkan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan

26

Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait Dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Sasaran kegiatan "Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan" didukung satu IKK yaitu "Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 2 Lembar atau tidak mencapai 1,43% dari target sebanyak 140 Lembar yang ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 9.544.000,- atau hampir 98,82% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 9.657.500,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan" belum tercapai secara efisien dengan adanya UU no.11 Tahun 2020 tentang cipta karya pemerintah menghapuskan IMB dan sebagai gantinya pemerintah menetapkan ketentuan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) PP 16/2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No.28 Thun 2020 tentang bangunan gedung, sehingga perizinan yang ada di Kecamatan di alihkan ke DPMPSTP.

Sasaran Kegiatan

27

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Sasaran kegiatan "Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan" didukung satu IKK yaitu "Angka partisipasi perempuan dalam Musrenbang Kecamatan".

Realisasi output tahun 2023 adalah rasio 0,38 rasio atau mencapai 100% dari target sebanyak rasio 0,38 dari keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, dalam Musrenbang Kecamatan tahun 2023 ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun pada triwulan I. Kegiatan ini melibatkan unsur dari OPD Kabupaten Luwu Timur yang terkait. Selain itu juga dihadiri oleh kepala unit kerja lingkup Kecamatan Wotu, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita.

Dalam pelaksanaannya dapat diperoleh gambaran bahwa partisipasi dari tokoh wanita/perwakilan gender masih perlu ditingkatkan. Tergambar dari jumlah peserta hadir sebanyak 193 orang, 116 adalah peserta laki-laki dan 77 orang peserta perempuan. Kurangnya peserta perempuan yang hadir salah satunya disebabkan oleh adanya anggapan bahwa rapat Musrenbang adalah domain laki-laki.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 14.280.000,- atau 95,05% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp.15.023.884,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Angka partisipasi perempuan dalam Musrenbang Kecamatan" sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 95,05%.

Sasaran Sub Kegiatan

28

Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan

Sasaran kegiatan "Terlaksananya pembinaan PKK Desa" didukung satu IKK yaitu "Jumlah PKK yang diberdayakan".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 90 orang atau mencapai 100% dari target sebanyak 90 PKK desa yang dibina.

Kegiatan Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa berupa pembinaan ibu-ibu PKK di desa dilaksanakan 12 kali dalam 1 tahun, masing-masing 5 kali/5 PKK/ desa di bina dalam 1 triwulan. Pembinaan yang dilakukan berupa peningkatan keterampilan, permasalahan kesehatan, pemahaman keagamaan dan lain-

lain.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 124.228.360,- atau 95,81 % dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 129.666.640

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Jumlah PKK desa yang diberdayakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub

29

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan

Sasaran kegiatan "Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti" didukung satu IKK yaitu "Persentase Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Serata persoalan Sosial yang Fasilitasi".

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan ini dilaksanakan sesuai dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kantor Camat Wotu

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 100% atau mencapai 100% dari target sebanyak 100% pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 6.015.000,- atau 81,91% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp.6.145.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Persentase Kasus Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan ini dilaksanakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%

Sasaran Sub Kegiatan

30

Peraturan Perundang-undangan dan Kepolisian Negara

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Kepolisian Negara

Sasaran kegiatan "Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara yang ditindaklanjuti" didukung satu IKK yaitu "Persentase Kasus Keamanan dan Ketertiban yang berhasil diselesaikan".

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara ini dilaksanakan sesuai dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kantor Camat Wotu

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 4 kali atau mencapai 100% dari target sebanyak 4 kali pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 5.480.000,- atau 85,69% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp.6.395.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Persentase Kasus Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan ini dilaksanakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Sub Kegiatan 31 **Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Sasaran kegiatan "Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ditindaklanjuti" didukung satu IKK yaitu "Jumlah Rapat yang dalam upaya Himbauan atau Pencegahan Pelenggran Ketentraman dan Keterlibatan yang dilaksanakan".

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kantor Camat Wotu

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 12 Kali atau mencapai 100% dari target sebanyak 12 Kali Pertemuan/Rapat yang harus ditindaklanjuti.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 3.285.000,- atau 81,21% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp.4.045.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Persentase Kasus Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ini dilaksanakan" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%

Sasaran Sub Kegiatan 32 **Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan**

Sasaran kegiatan "Terlaksananya rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan" didukung satu IKK yaitu "Persentase rekomendasi koordinasi forum pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti".

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 100% mencapai dari target sebanyak 100% persentase rekomendasi hasil rakor forum pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti.

Kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dilaksanakan 12 kali dalam 1 tahun, biasanya dilaksanakan setelah pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN). Kegiatan ini melibatkan unsur Muspika, kepala unit kerja lingkup Kecamatan Wotu, Kepala sekolah, Kepala Desa, anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam rapat koordinasi ini akan dibahas berbagai persoalan kemasyarakatan yang

terjadi serta solusi yang akan ditempuh. Dalam rapat ini muncul rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing masing unit kerja terkait, misalnya rekomendasi terkait kesehatan akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas, rekomendasi terkait pertanian harus ditindaklanjuti Balai Penyuluh Pertanian dan seterusnya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 32.931.500,- atau 99,19% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 33.200.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Persentase rekomendasi koordinasi forum pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 33

Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa

Sasaran kegiatan "Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Paeraturan Dea dan Peraturan Kepela Desa" didukung satu IKK yaitu " Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya".

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan APBDes Pokok;
2. Fasilitasi penyusunan APBDes Perubahan;

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 34 dokumen atau tidak mencapai 100% dari target sebanyak 17 Desa yang terfasilitasi Perdes APBDesnya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 7.082.000,- atau 96.45% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 7.343.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK " Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%,

**Sasaran Kegiatan
36**

**Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah
Kecamatan**

Sasaran kegiatan "Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan" didukung satu IKK yaitu "Persentase Desa yang tertib administrasinya".

Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan Desa diwilahnya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun (dilaksanakan tiap Semester) ke 17 desa yang ada di wilayah Kecamatan Wotu. Kegiatan ini meliputi Pengawasan pembangunan Perdesaan . Hasil pelaksanaan kegiatan ini kemudian dituangkan dalam dokumen laporan tiap Semester.

Realisasi output tahun 2023 sebanyak 100% atau mencapai 100% dari target sebanyak 100% Desa yang tertib administrasinya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 8.390.000,- atau 98,36% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp.8.530.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK "Persentase Desa dan Kelurahan yangb tertib administrasinya" telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebesar 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

LAKIP Kecamatan Wotu ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan evaluasi kinerja. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Wotu diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasi selama Tahun 2023 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator sasaran program sebanyak 6 Program, 14 kegiatan dengan sasaran sub kegiatan sebanyak 34'

PAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal karena masih adanya beberapa kelemahan dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang di ambil adalah sebagai berikut :

3. Adanya jabatan struktural yang lowong, maka diusulkan pengisian jabatan struktural yang masih kosong kepada OPD terkait sehingga semua tupoksi bisa tertangani dengan baik;
4. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang masih belum maksimal maka diupayakan untuk melaksanakan atau mengikuti pelatihan sesuai tupoksi agar kualitas sumberdaya aparatur meningkat.
5. Adanya disiplin pegawai yang belum maksimal maka ditegakkan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.

6. Adanya beberapa kegiatan yang daya serap anggarannya masih belum maksimal, maka kedepannya harus lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Wotu Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja Kecamatan Wotu serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Wotu untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government.

Wotu, 27 Januari 2024

Camat Wotu,



HASIS DAWI, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004